

## B A B V

## KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari analisa tentang Peranan IPEDA Sebagai Salah Satu Sumber Pembiayaan Pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesa terbukti kebenarannya, yakni bila usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dapat berhasil dengan baik, akan dapat meningkatkan penerimaan IPEDA, yang berarti akan dapat menambah dana untuk pembangunan daerah, khususnya di Kota madya Daerah Tingkat II Surabaya.

Sedangkan kesimpulan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Apabila melihat realisasi penerimaan IPEDA pada periode tahun anggaran 1975/1976 sampai dengan tahun anggaran 1979/1980 secara prosentase menunjukkan kenaikan sebesar 99,27 %, hal ini merupakan berhasilnya program intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Akan tetapi peranan IPEDA terhadap anggaran pembangunan pada periode yang sama lebih kecil bila dibandingkan dengan bantuan Pemerintah Pusat yang berupa Inpres.

Dengan demikian program intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan IPEDA belum sepenuhnya berhasil,

sebab ada obyek IPEDA di wilayah Kotamadya Surabaya tepatnya di daerah Tanjung Perak Surabaya sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1980 belum dikenakan IPEDA, begitu juga masih adanya tunggakan IPEDA sektor Perkotaan yang tidak bisa ditagih sampai saat dikeluarkannya laporan tanggal 31 Maret 1981 sebesar Rp. 1.500.000,-.

Disamping itu juga masalah pendataan luas tanah dan bangunan belum seluruhnya didata sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. IPEDA merupakan jenis pajak Pemerintah Pusat yang menjadi obyek adalah tanah dan bangunan, hasil dari pada pungutannya diserahkan kepada Daerah Tingkat II yang bersangkutan guna membiayai pembangunan.

Usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam meningkatkan penerimaan IPEDA adalah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi.

Dalam perkembangannya, realisasi penerimaan IPEDA pada tahun anggaran sebesar Rp. 715.511.818,92 dan pada tahun anggaran 1979/1980 meningkat menjadi Rp. 1.425.784.870,76 yang berarti dalam waktu lima tahun dari tahun anggaran 1975/1976 sampai dengan tahun anggaran 1979/1980 mengalami kenaikan sebesar Rp. 710.273.051,76 atau 99,27 %.

Dengan demikian rata-rata tiap tahun terdapat kena-

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
SURABAYA RURWOKO

ikan sebesar 19,17 %. Adapun peranan IPEDA terhadap penerimaan pembangunan selama lima tahun dari tahun anggaran 1975/1976 sampai dengan tahun anggaran 1979/1980 rata-rata 20,03 %, sedangkan peranan bantuan Pemerintah Pusat yang berupa Inpres rata-rata 25,56 %.

Dengan demikian kenaikan realisasi penerimaan IPEDA belumlah dapat mengimbangi penerimaan pembangunan terutama yang berasal dari Pemerintah Pusat yang berupa Inpres.

3. Pada hakekatnya perbedaan IPEDA sektor perkotaan sistem lama dengan sistem baru, untuk tujuan penge-  
naan IPEDA sektor Perkotaan diadakan klasifikasi tanah dan bangunan serta tarip IPEDA yang didasari pada harga bangunan yang wajar, maka harga jual dapat ditaksir dengan memperhatikan harga material yang bersangkutan.

Dalam penentuan klasifikasi tarip IPEDA menurut sistem lama ditentukan klasifikasi bangunan permanen, semi permanen dan non permanen, sedangkan klasifikasi tarip IPEDA atas bangunan menurut sistem baru ditentukan dalam klasifikasi bangunan type A yaitu bangunan mewah, type B yaitu bangunan semi mewah, type C bangunan standar, dan type D bangunan sedang.

Dengan demikian, dalam menentukan klasifikasi bangun

non sistem baru akan lebih sempurna daripada klasifikasi bangunan sistem lama.

4. Sejalan dengan perkembangan pembangunan di Kotamadya Tingkat II Surabaya, maka realisasi penerimaan IPEDA Sektor Perkotaan menduduki tempat teratas, dimana pada tahun anggaran 1975/1976 sampai dengan tahun anggaran 1979/1980 rata-rata tiap tahunnya sebesar 91 % dari seluruh realisasi penerimaan IPEDA, dan realisasi penerimaan IPEDA Sektor Pedesaan sebesar 4 % dari seluruh realisasi penerimaan IPEDA, realisasi-penerimaan sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan adalah sebesar 5 % dari seluruh penerimaan IPEDA. Dengan demikian adanya perkembangan pembangunan kota secara nyata akan mengakibatkan melonjaknya harga jual tanah yang terus menanjak sejalan dengan fasilitas kota itu sendiri.

## 2. Saran

1. Dalam usaha meningkatkan penerimaan IPEDA untuk tahun anggaran yang akan datang haruslah didukung pula dengan usaha-usaha pemungutan yang lebih diintensifkan dan lagi dan kontinyu.

Sejalan dengan ini bahwa suksesnya pemungutan IPEDA di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tergantung dari beberapa faktor antara lain:

- Tepatnya data mengenai obyek dan subyek IPEDA.

- > Tepatnya besarnya penetapan IPEDA
- > Tepatnya waktu penangutan IPEDA
- > Ketrempilan dan keluwesan para petugas dalam menegakati wajib IPEDA

Dalam hal ini perlu diadakan penyempurnaan dalam menyelesaikan baik dalam pendataan maupun soal mutasi subyek dan obyek IPEDA secara tepat dan cermat.

2. Meningkatkan terus mutu pelayanan yang diberikan baik melalui cara mempercepat proses pembayaran yang mudah dan cepat, maupun mutu daripada pelayanan itu sendiri.
3. Perlu adanya penerapan pengawasan yang baik dalam melaksanakan tugas, disamping dituntut bekerja keras. Sedangkan pengawasan yang efisien adalah terletak pada hati nurani masing-masing petugas, baik atau tidak mengendalikan diri. Tanpa pengendalian diri akan menimbulkan hal-hal yang menghambat pelaksanaan tugas.
4. Agar program intensifikasi dan ekstensifikasi penangutan IPEDA di Kotasadya Daerah Tingkat II Surabaya berhasil, maka perlu diadakan :
  - > Perlu disempurnakan usaha pendataan kembali baik obyek maupun subyek IPEDA yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.
  - > Agar jangan sampai timbul surat ketetapan IPEDA

rangkap, perlu penyelesaian semua ketetapan banding (permohonan pengajuan keberatan atas ketetapan IPEDA) serta mengenai mutasi subyek dan obyek IPEDA segera diselesaikan, dengan cepat dan betul.

- Perlu diadakan loket pembayaran yang mendekati wajib IPEDA, misalnya di wilayah Surabaya Utara, Surabaya Selatan, Surabaya Timur.

Degitu pula perlu adanya kerjasama antara petugas pemungutan dengan Kecamatan, Kelurahan maupun dengan pengurus kampung misalnya RT/RW dalam hal pemungutan IPEDA baik untuk sektor Perumahan maupun Sektor Non Perumahan.